

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Kaho, Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1994).

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Moh. Pabundu, Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

M. Iqbal, Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Pattinasarany, Gregorius D.V., *et al.*, Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022–2041: Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri, (KOMPAK, 2021).

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, DASAR METODOLOGI PENELITIAN, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Situmorang, Victor, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Sumule, Agus, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Sumule, Agus Irianto., *et al.*, KAJIAN PEMANFAATAN Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat 2002–2018, (KOMPAK, 2019).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Suryani, D., Zuhro, S. R., Cahyono, H., Aziz, L. L. N., Aulia, D., & Maulana, Y. Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus Studi Kasus Bali dan Maluku Utara (D. Suryani & S. R. Zuhro (eds.); 1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

JURNAL

Alivia, D, Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. *Rechtsidee*, Vol. 14 No. 2 Desember 2019

Marit, E. L., dan Warami, H, Wacana “Papua Tanah Damai” dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 16 No. 1 April 2018

Mohammad A, Musa’ad, KONTEKSTUALISASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA: Perspektif Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan, *Jurnal Kajian*, Vol. 16 No. 2 Juni 2011.

Nilamsari, Natalina, MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF, *Wacana*, Vol. 13 No. 2 Juni 2014.

Noach Hendrik Daud Dwaa dan Eko Prasajo, Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Seleksi Bintara Polri Di Polda Papua 2019, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15 No. 2, 2021.

Rengen, Yamin, KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYATPAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS 2017, *Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 3 October 2017.

Rohim, Nur, OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN KEKERASAN, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2004.

Ronsumbre, Adolof, dan Huwae, Marlon Arthur, MEMITOSKAN MITOS (KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROPINSI PAPUA BARAT), *Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua Manokwari Propinsi Papua Barat*, 2019.

Sawasemariai, Hani S., MAJELIS RAKYAT PAPUA - PAPUA BARAT (MRP-PB) (Studi Sosiologis Tentang Peran MRP-PB dalam Menfasilitasi Aspirasi Masyarakat Adat Papua Barat), (Skripsi Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA, 2019).

Therresse Nofianti, PERUBAHAN SOSIAL KOMUNITAS SUKU ARFAK KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PAPUA BARAT, (AGRIBUSINESS JOURNAL, Vol. 13 No. 2, 2019).

Yepese, Debora Ketty, KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK-HAK MASYARAKAT ASLI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, (Artikel Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat.